



bappeda
Kota metro



Strategi Pencegahan Percepatan Penurunan *Stunting* (P3S) di Kota Metro Tahun 2025–2029



Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos., M.Pd.I. / Dr. M. RAFIEQ ADI PRADANA

Wali Kota Metro

Wakil Wali Kota Metro



Bappeda.metrokota.go.id



 Bappeda Metro

 bappedda_metro

GENERASI EMAS 2045

Gagasan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berdaya saing, kompeten, dan berkualitas. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045, yaitu 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa



FAKTA DATA

Prevalensi stunting di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan berdasarkan data dari **Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Angka prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2023. Namun, capaian ini masih belum cukup untuk memenuhi target 14% pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA





Langkah-Langkah Strategis



01

Sinkronisasi Program dengan Asta Cita

Program percepatan penurunan stunting harus diselaraskan dengan pilar-pilar Asta Cita, khususnya dalam Upaya peningkatan kualitas Kesehatan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.



02

Perencanaan Berbasis Data yang Akurat

Dokumen RPJMD dan Renstra OPD harus mencerminkan kondisi nyata dilapangan, terutama menentukan prioritas wilayah, jumlah kelompok sasaran, dan alokasi sumber daya



03

Koordinasi Lintas Sektor yang Kuat

Kolaborasi antara sektor Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, dan sektor lainnya harus terus diperkuat untuk memastikan efektivitas aksi konvergensi



04

Optimalisasi Penggunaan Anggaran Daerah

Pastikan APBD, termasuk dana kelurahan, digunakan untuk mendukung program-program yang langsung berdampak pada kelompok sasaran prioritas



05

Pemanfaatan Momentum Kepala Daerah Baru

Dokumen perencanaan yang telah disusun dapat menjadi panduan strategis bagi Kepala Daerah baru untuk melanjutkan program prioritas secara berkelanjutan



Gambaran Umum Kota Metro



Geografi



Luas Wilayah : 73,21 km² (0,2 % Lampung)

Terdiri dari : **5** Kecamatan
22 Kelurahan



Posisi Startegis

- 10 km Gerbang tol 25 km Bandara
- Pusat Kegiatan Wilayah Lampung
- Pusat Jasa dan Perdagangan
- Biaya Hidup Murah



Pusat Pendidikan

- Perguruan Tinggi : **13** Unit
- SLTA/MA/SMK : **49** Unit
- SMP/MTs : **41** Unit
- SD/MI : **75** Unit
- TK/PAUD : **149** Unit



Kota Inklusif

- Sekolah Inklusif : **38** Unit
- SLB Negeri : **1** Unit
- SLB Swasta : **4** Unit
- Pusat layanan Autis (PLA)
- PUSPAGA GAHARU
- Sarana Publik Ramah
- Disabilitas



Pusat Kesehatan

- RS Pemerintah : **2** Unit
- RS Swasta : **7** Unit
- RS Hewan : **1** Unit
- Puskesmas : **11** Unit

Demografi 2024

Sumber : Metro Dalam Angka 2025 (BPS)



Jumlah Penduduk : 182.293 jiwa

- Laki-laki : **91.701** jiwa
- Perempuan : **90.592** jiwa
- Sex ratio : **101**



Laju Pertumbuhan Penduduk : 1,55



Jumlah Keluarga : 57.877 KK

Jumlah Anak-Anak (usia 0-18 tahun)
49.725 jiwa (27,28%)



Penduduk Produktif : 126.384 jiwa (69,33%)
Dependency Ratio : 45,77

Indeks Pembangunan Manusia

2024: 80,41

Kategori **Sangat Tinggi**

Angka Harapan Hidup (AHH)

2024: 75,43 tahun

Tertinggi di Provinsi Lampung

Angka Harapan Lama Sekolah

2024: 14,79 tahun

Tertinggi di Lampung

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

2024: 11,01 tahun

Tertinggi di Lampung

Prevalensi Stunting

2024: 12,2 %

Terendah kedua di Lampung

Pertumbuhan Ekonomi

2024: 4,88%

Lebih tinggi dari provinsi Lampung

Kemiskinan

2024: 6,78%

Lebih rendah dari Provinsi dan nasional

Gini Rasio

2024: 0,277

Ketimpangan sangat rendah



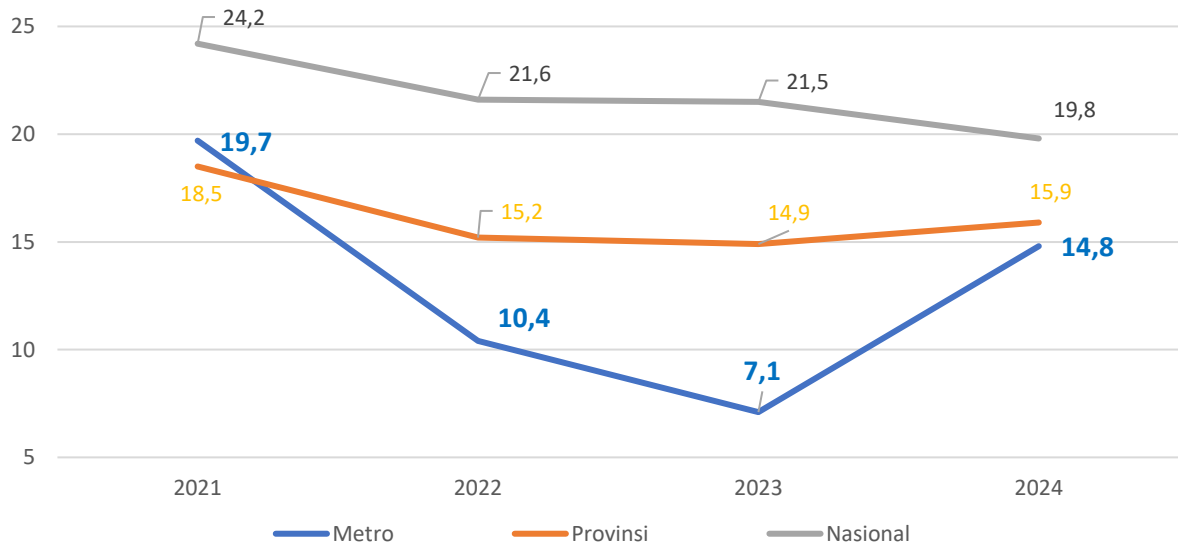
Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Kota Metro Tahun 2024





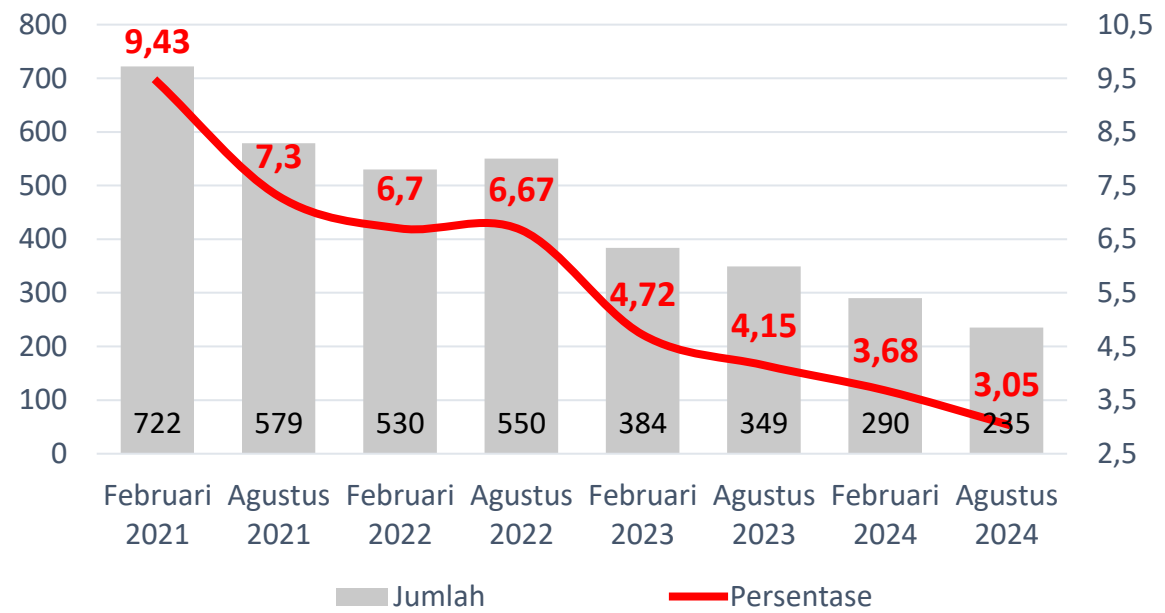
Prevalensi Stunting Balita

Prevalensi *Stunting* Kota Metro, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: SKI dan SSGI

Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* Kota Metro Berdasarkan Data ePPBGM 2021-2024

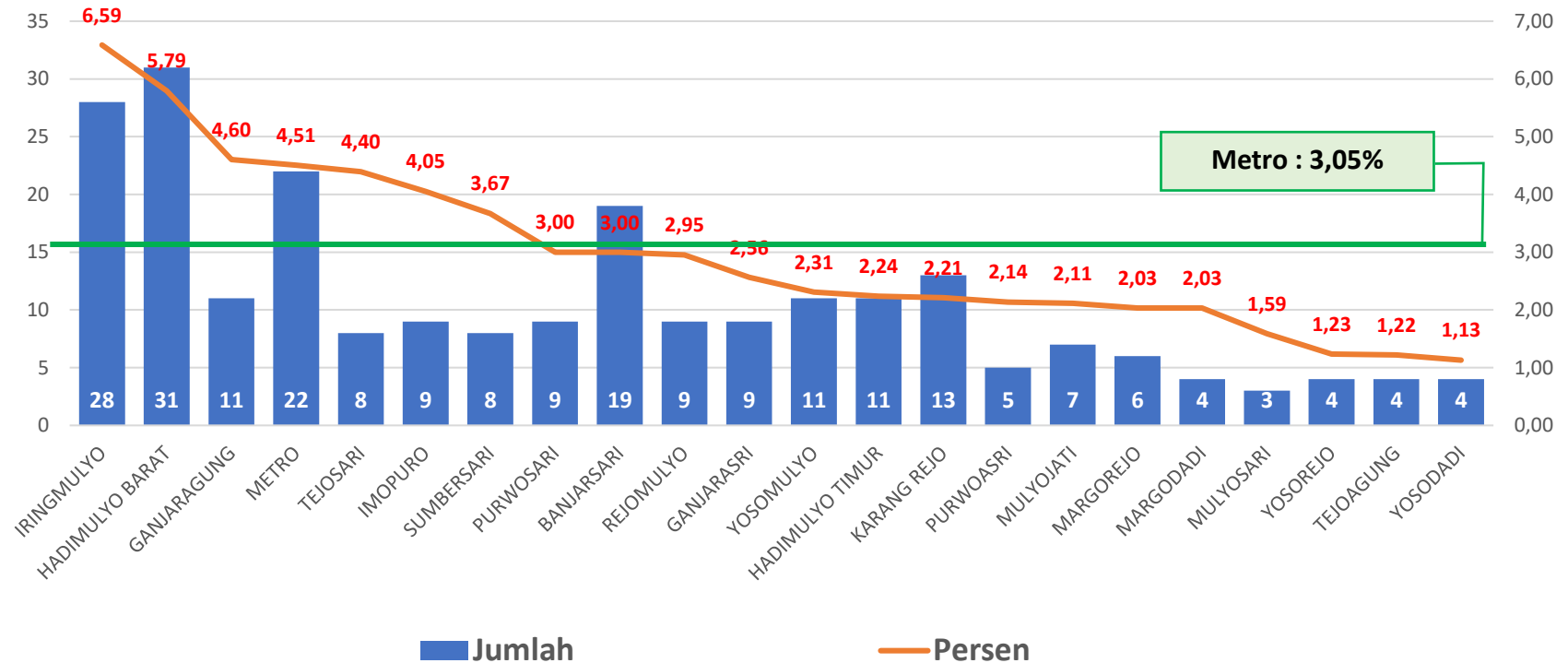
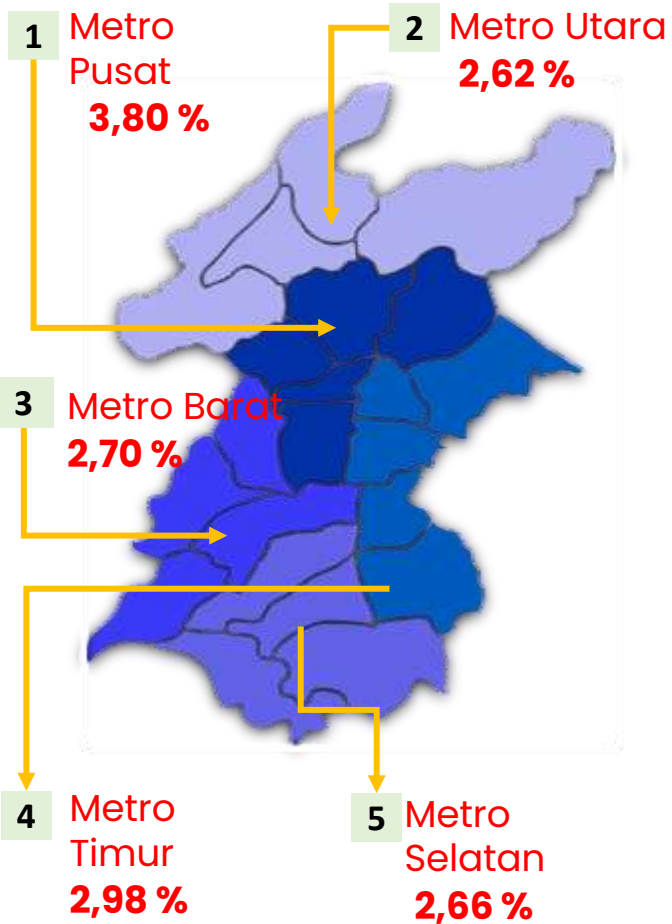


Capaian Prevalensi *Stunting* Kota Metro Tahun 2024 hasil SSGI 2024 sebesar 14,8% berada di bawah Prevalensi *Stunting* Provinsi Lampung (15,9%) dan Prevelensi Nasional (19,8%)



Prevalensi Stunting

Sebaran **Jumlah & Persentase** Balita Stunting Per Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Data E-PPBGM (31 Agustus 2024)



Ada **7** Kelurahan
Berada di atas rata-rata Persentase
Balita Stunting Kota Metro (3,05%).

Dan **15** Kelurahan
di bawah Rata-rata Persentase
Balita Stunting Kota Metro (3,05%)



Audit Kasus Stunting (AKS) 2024

Sasaran AKS



Catin

Sampel **4** orang



Ibu Hamil

Sampel **5** orang



Ibu Bersalin

Sampel **5** orang



Baduta

Sampel **5** orang



Balita

Sampel **5** orang

Faktor risiko *stunting* Kota Metro hasil AKS

- ✓ Anemia
- ✓ Terpaparnya asap rokok,
- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pola asuh orang tua
- ✓ Pengolahan/Pengelolaan Gizi yang baik



Penilaian Kinerja Stunting

HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 DAN 2023

Nilai	Klasifikasi	Tahun 2022	Tahun 2023	Ket
> 99	Berdaya	214	299	Naik
66 - 99	Berkembang	47	177	Naik
< 66	Tumbuh	253	38	Turun
Jumlah		514	514	

1. Jumlah kab./kota **"Berdaya"** meningkat dari 214 kab./kota di tahun 2022, menjadi 299 kab./kota pada tahun 2023.
2. Sejumlah 66 kab./kota **"Tumbuh"** tahun 2022 meningkat menjadi **"Berkembang"** pada tahun 2023.
3. Terdapat juga 114 kab./kota **"Tumbuh"** tahun 2022 meningkat menjadi **"Berdaya"** pada tahun 2023.

LAPORAN PK KABUPATEN 2024

LAPORAN PK

Copy CSV PDF Print

Search:

NO	TAHUN PELAKSANAAN PK	PROVINSI	KABUPATEN	SKOR	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2024	18 - LAMPUNG	1872 - KOTA METRO	131	1	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Copy CSV PDF Print

Search:

NO	TAHUN	REKOMENDASI
1	2024	Perlu mempertahankan keterisian yang sudah baik.

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

- Penilaian Kinerja 2024 Kota Metro menduduki **Peringkat 1** di Provinsi Lampung (emonev Bangsa Kemendagri RI)
- Hasil Penilaian Kinerja 2024 dari Bangsa Kemendagri RI Kota Metro termasuk dalam Klasifikasi **"Berdaya"**



Klasifikasi Penilaian Kinerja Stunting



Berdaya

Daerah yang berada dalam kategori "Berdaya" adalah wilayah yang sudah memiliki kemampuan dan sumber daya yang baik dalam melaksanakan program penurunan stunting. Mereka sudah memiliki sistem yang kuat, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, dan dapat menjalankan program secara mandiri. Daerah ini juga mampu melakukan inovasi dan berbagi praktik terbaik untuk membantu daerah lain.



Berkembang

Daerah yang dikategorikan "Berkembang" adalah wilayah yang sedang dalam tahap peningkatan kapasitas dan sumber daya. Mereka sudah memiliki dasar atau fondasi untuk menjalankan program penurunan stunting, tetapi masih memerlukan bantuan atau pendampingan, terutama dalam hal teknis, koordinasi lintas sektor, dan penguatan anggaran. Daerah berkembang sering kali memerlukan peningkatan sumber daya manusia serta koordinasi lebih lanjut agar dapat naik kelas menjadi daerah yang berdaya.



Bertumbuh

Daerah dalam kategori "Bertumbuh" biasanya baru memulai atau memiliki kapasitas yang masih sangat terbatas dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Mereka mungkin belum memiliki struktur yang memadai, sumber daya manusia yang cukup, atau anggaran yang kuat. Daerah ini memerlukan pendampingan intensif, bimbingan teknis, serta dukungan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membangun kapasitasnya sehingga dapat naik ke kategori "Berkembang".



Tantangan Dan Pembelajaran Pelaksanaan Program PPS Periode Tahun 2018 - 2024

Komitmen Politik Pemimpin Penting Tapi Tidak Cukup

Komitmen sangat penting, namun komitmen saja tidak cukup, perlu diterjemahkan menjadi program riil di lapangan. Menerjemahkan komitmen menjadi kegiatan nyata seringkali tidak mudah.

Penajaman dan Peningkatan Cakupan Program Perlu Dilakukan

PPS melibatkan banyak program. Beberapa intervensi belum sensitif dan cakupannya belum baik. Penajaman perlu dilakukan untuk memastikan intervensi lebih fokus. Perlu koordinasi yang baik yang didukung kerangka konsep, data dan argumen yang jelas dan kuat.

Desentralisasi: Perlu Peningkatan Kapasitas & Pendampingan

PPS melibatkan 38 prov, 514 kab/kota dan 85 ribu desa/kel. Setiap kepala daerah mempunyai visi, misi & prioritas. Di sisi lain, kapasitas Pemda bervariasi. Oleh karena itu, advokasi, pendampingan & peningkatan kapasitas penting dilakukan.

Keterlibatan Multistakeholder Perlu Dikoordinasikan

Banyaknya pihak yang terlibat PPS perlu penguatan dalam koordinasi dan saling memahami tentang peran yang harus dilakukan, sehingga konvergensi bisa diciptakan.

Penguatan Perencanaan & Penganggaran Berbasis Data

Perencanaan & penganggaran saat ini belum menggunakan data yang baik. Perlu ada kesadaran dan kesepakatan bersama dan peningkatan kapasitas bagi pelaku terkait dengan proses pendataan, maupun analisis serta penggunaannya.

Pemantauan dan Evaluasi Terintegrasi: Konsep yang Ideal

PPS harus dipantau secara reguler, sehingga diketahui perkembangannya, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu sistem Monev PPS harus mengakomodir setiap pihak yang sudah mempunyai dan melaksanakan sistem monev sendiri-sendiri

Perubahan Perilaku Tidak Mudah dan Perlu Waktu

Stunting terkait dengan perilaku yang . tidak mudah diubah, terutama jika terkait mitos dan kepercayaan yang kontraproduktif. Diperlukan waktu & strategi khusus, termasuk Pelibatan tokoh agama dan masyarakat serta perluasan kelompok sasaran.

Konvergensi Mudah Diucapkan, Sulit Diwujudkan

Konvergensi adalah salah satu pilar PPS. Menciptakan konvergensi tidak mudah, yang disebabkan oleh banyak hal. Seperti ego sektoral, perbedaan pemahaman, prioritas dan tujuan, siklus program, dan penyebab lainnya.

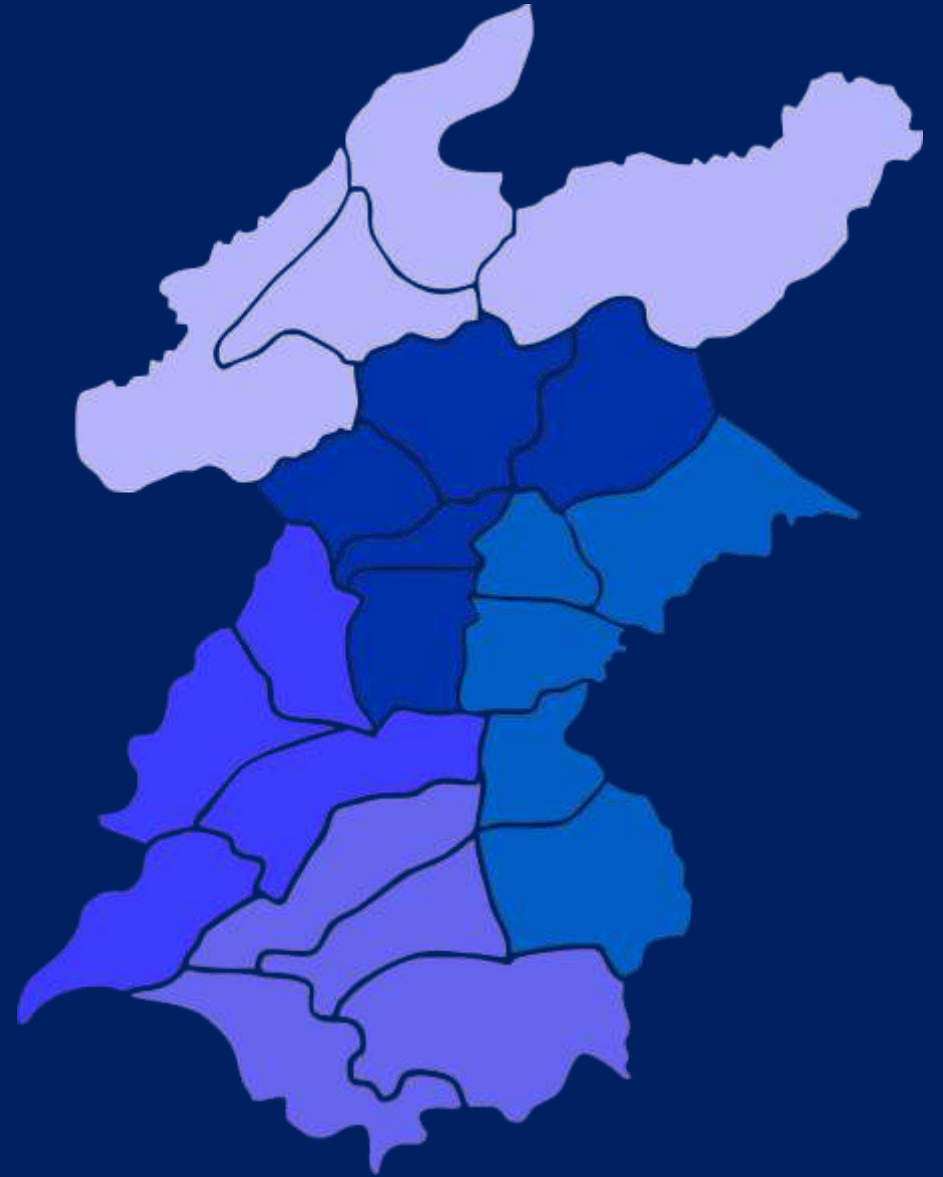
Keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah: Perlu ada arahan

Pelibatan Lembaga non Pemerintah dalam PPS harus dibawah arahan dan koordinasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih dan menciptakan sinergi. Penting adanya dokumen acuan pelaksanaan program.

Sumber: Paparan Draft Stranas, 31 Okt 2024



Strategi Percepatan Penurunan Stunting Kota Metro



Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

(Perpres 72 Tahun 2021)

5 PILAR

1

Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.

2

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

3

Peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.

4

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

5

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi riset, dan inovasi

RAN PASTI 2021

**Fokus Percepatan
Penurunan Stunting**

STRANAS 2025-2029

**Fokus Percepatan
Pencegahan dan
Penurunan
Stunting**

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

"Stranas P3S" Tahun 2025-2029

6 PILAR

1



Komitmen Politik Kepemimpinan di Tingkat Pusat dan Daerah

2



Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

3



Konvergensi Program dan Kemitraan

4



Ketahanan Pangan dan Gizi

5



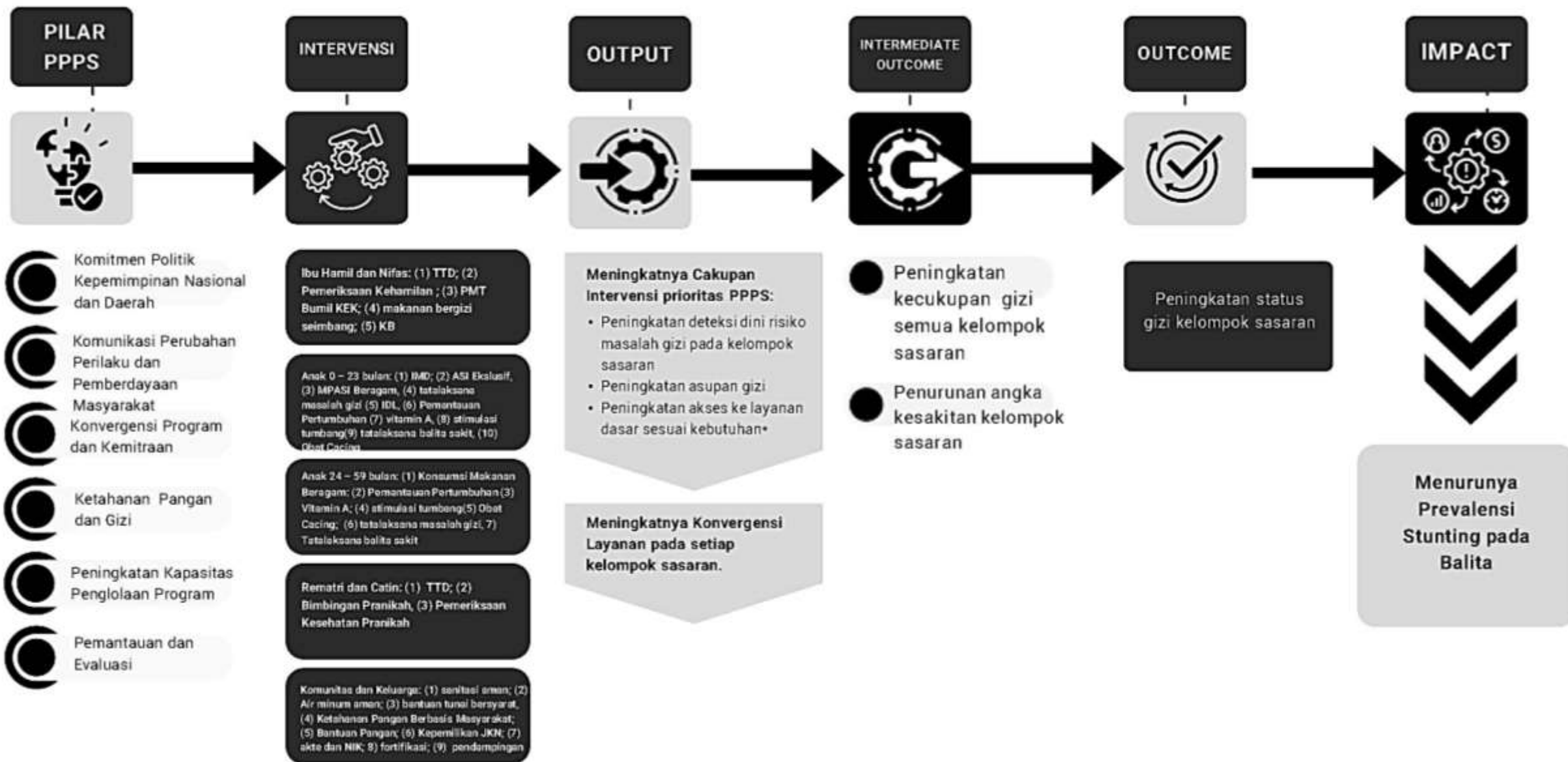
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program

6



Pemantauan dan Evaluasi

Logical Frame Work STRANAS PPPS 2025–2029



Aksi konvergensi merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Melalui aksi konvergensi, diharapkan dapat terjadi sinergi antara berbagai pelaku kepentingan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar.

SIKLUS 8 AKSI KONVERGENSI

SIKLUS AKSI KONVERGENSI P3S



DIUBAH



1. Analisis Situasi
2. Penguatan Perencanaan
3. Penguatan Pelaksanaan
4. Penilaian Hasil Monev

2 Aksi Pendukung
Regulasi dan Publikasi

a Pengumpulan Data Sasaran

1 Data Dasar Kependudukan

- Jumlah Penduduk
- Jumlah Rumah Tangga/Keluarga

2 Data Sasaran



Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui



Remaja Putri (Rematri)



Anak Usia 0-23 bulan (Baduta)



Calon Pengantin (Catin)



Anak Usia 24-49 bulan (Balita)



Rumah Tangga/ Masyarakat

b Pengumpulan data capaian layanan berdasarkan indikator layanan

c Pengumpulan data program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan, termasuk anggaran APBD, APBDesa, serta kontribusi dari masyarakat dan pihak swasta

d Melakukan identifikasi masalah terkait ketercapaian layanan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, serta pola asuh yang relevan.

e Menyusun rekomendasi intervensi dan rencana program/kegiatan prioritas intervens

f Penetapan target prevalensi stunting dan capaian layanan berdasarkan indikator intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Penguatan Perencanaan



1. Melaksanakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (**Pra-Musrenbang**) **tematik stunting**.
2. **Menyusun rencana program dan kegiatan** yang didanai dari berbagai sumber, mencakup sasaran dan target kinerja di setiap sektor (kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pangan), serta jelas.
3. Melakukan **pemilahan rencana program/kegiatan** dalam bidang fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi.
4. **Membangun komitmen pemangku kepentingan** untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk kesepakatan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, mekanisme koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian permasalahan di lapangan, serta pelibatan organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
5. **Melakukan penandaan rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan** Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan dari Subkegiatan tematik stunting dalam SIPD tahun berikutnya di suatu wilayah.

Penguatan Pelaksanaan

1. **Melakukan penandaan terhadap rincian kegiatan, belanja dan aktifitas per indikator layanan** Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang merupakan turunan Subkegiatan tematik stunting dalam APBD sebagaimana tertuang dalam SIPD pelaksanaan.
2. **Melakukan identifikasi realisasi** program/kegiatan sampai dengan **semester I dan II** yang bersumber dari APBDesa, swadaya masyarakat dan kemitraan pada tahun berjalan.



Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Monitoring

- Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Monitoring terhadap pelaksanaan aksi konvergensi mulai dari analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, dukungan regulasi dan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi;
- Melakukan pengkategorian wilayah berdasarkan klasifikasi tumbuh, berkembang dan bedaya dalam pelaksanaan aksi konvergensi.



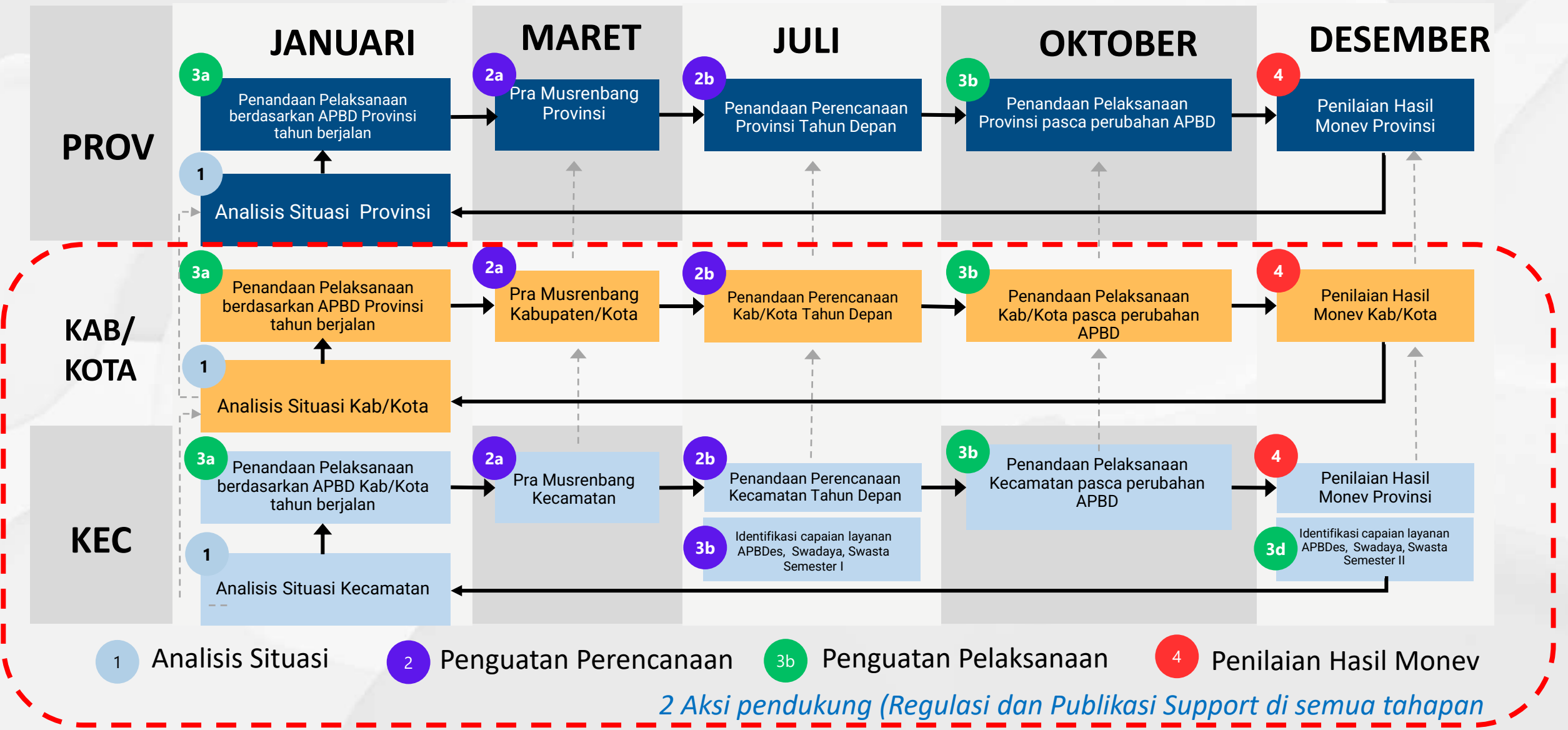
Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Mengidentifikasi terhadap penyusunan dan penetapan kebijakan atau regulasi yang memperkuat pelaksanaan tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, dapat berupa antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan berita acara.

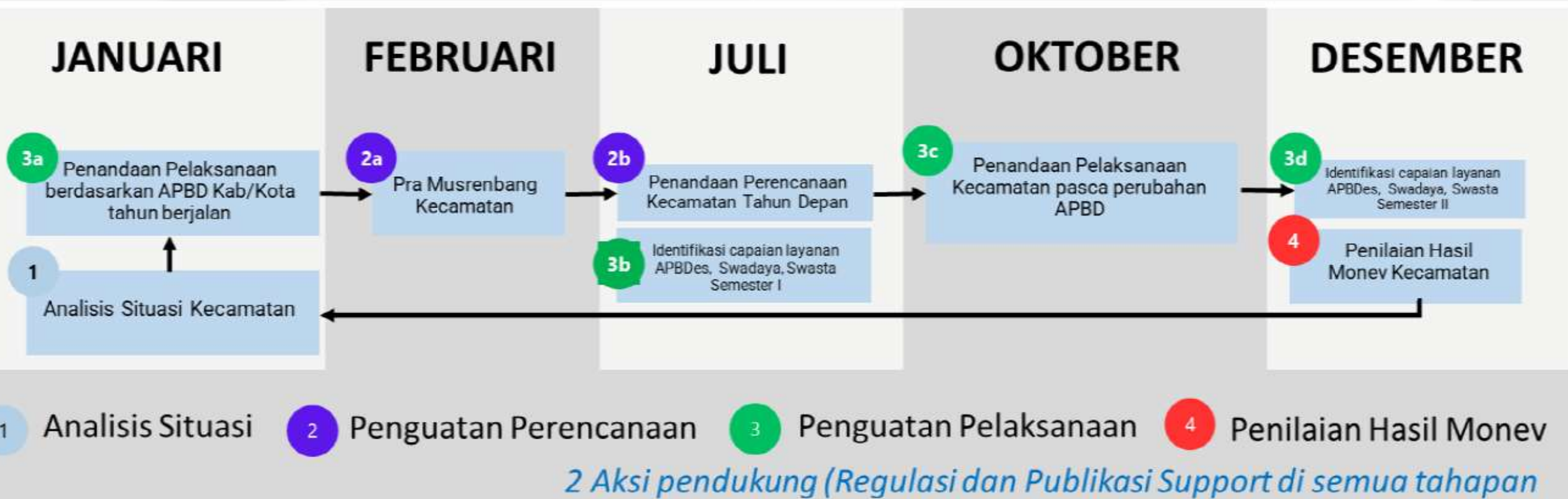
Publikasi

Melakukan identifikasi pelaksanaan publikasi terhadap hasil tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat berupa antara lain berita media sosial, televisi, radio, kampanye, dan laporan publikasi hasil aksi dalam web.

SIKLUS PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI



Pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan merupakan langkah penting dalam memastikan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting berjalan secara efektif dan terukur



Tahapan AKSI KONVERGENSI KECAMATAN



ANALISIS SITUASI

Mengidentifikasi, memahami, dan menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di suatu wilayah

- Jumlah sasaran
- Capaian Layanan
- Program/Intervensi
- Jumlah Layanan
- Tenaga Layanan



PENGUATAN PERENCANAAN

Proses persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Musrenbang
- Penandan dalam RKP
- Identifikasi capaian layanan semester 1
- Tindak Lanjut dan Perbaikan



PENGUATAN PELAKSANAAN

Memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan

- Penandaan program APBD tahun berjalan
- Penandaan program APBD tahun berjalan pasca perubahan



PENILAIAN HASIL MONEY

Menilai kemajuan dan efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditetapkan

- Identifikasi Capaian Layanan
- Identifikasi Masalah dan Tantangan
- Pelaporan Hasil Reviu (capaian layanan, pelaku, -laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas

Desember dan Januari

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)

Februari & Juli (Tahun berjalan)

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)

Januari & Oktober

- Camat (Approval)
- Sekcam (verifikator)
- Petugas kecamatan (operator)

Desember

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)



Lokus Stunting Tahun 2025

KELURAHAN LOKUS STUNTING TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 487/KPTS/ B- 02/2024

Kel. Hadimulyo Barat

- **244** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **44** Balita *Stunting*
- Prevalensi 8,51 % (Mei 2024)

1

Kel. Purwosari

- **266** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **20** Balita *Stunting*
- Prevalensi 6,47 % (Mei 2024)

2

Kel. Banjarsari

- **247** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **38** Balita *Stunting*
- Prevalensi 6,24 % (Mei 2024)

3



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 487/KPTS/B-02/2024

TENTANG

KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* memerlukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
- b. bahwa agar upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2025, dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang

4

Kel. Imopuro

- **157** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **13** Balita *Stunting*
- Prevalensi 6,22 % (Mei 2024)

5

Kel. Metro

- **347** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **27** Balita *Stunting*
- Prevalensi 5,39 % (Mei 2024)

6

Kel. Hadimulyo Timur

- **244** Keluarga Beresiko *Stunting*
- **23** Balita *Stunting*
- Prevalensi 4,14 % (Mei 2024)



Lokus Stunting Tahun 2026

KELURAHAN LOKUS STUNTING TAHUN 2026

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 400.7.15-296 TAHUN 2025

Kel. Hadimulyo Barat

- **137** Keluarga Beresiko Stunting
- **34** Balita Stunting
- Prevalensi **6,4%** (Feb 2025)

1

Kel. Metro

- **199** Keluarga Beresiko Stunting
- **22** Balita Stunting
- Prevalensi **4,4 %** (Feb 2025)

2

Kel. Banjarsari

- **161** Keluarga Beresiko Stunting
- **21** Balita Stunting
- Prevalensi **3,2 %** (Feb 2025)

3



TENTANG

LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING TAHUN 2026

WALI KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
b. bahwa percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

4

Kel. Iringmulyo

- **135** Keluarga Beresiko Stunting
- **23** Balita Stunting
- Prevalensi **5,1 %** (Feb 2025)

5

Kel. Ganjar Asri

- **187** Keluarga Beresiko Stunting
- **44** Balita Stunting
- Prevalensi **3,1 %** (Feb 2025)

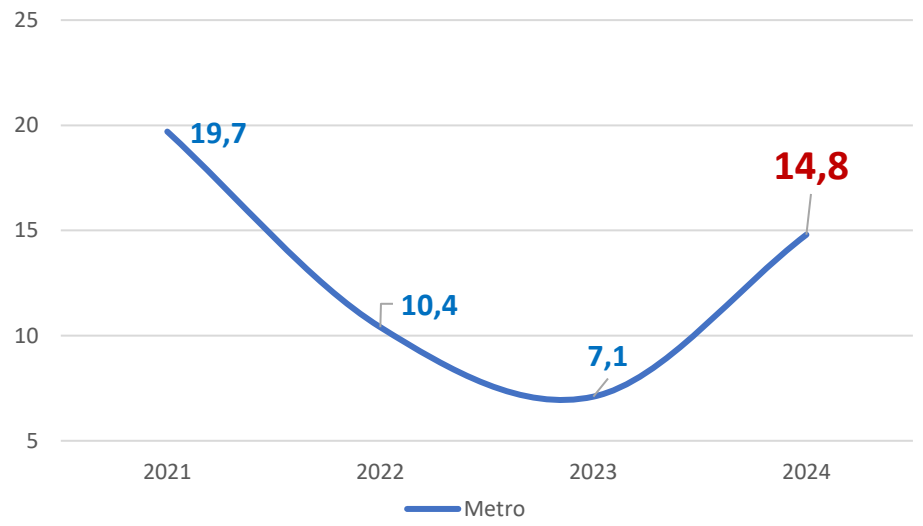


Upaya Percepatan Penurunan Stunting Kota Metro

Prevalensi Stunting Kota Metro

2024 : 14,8 %

Menurut Hasil **Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)** terjadi Peningkatan Prevalensi Stunting pada tahun 2024 sebesar 208%, dari **7,1 %** ditahun 2023, menjadi **14,8%.**



Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting telah Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Sasaran RPJMD Kota Metro 2025-2029

TARGET	2025	2026	2027	2028	2029	2029



Prioritas Masalah Stunting Tahun 2025



Faktor Ibu

- Ibu Pekerja
- Pola asuh terutama perilaku dan praktik pemberian makan kepada Bayi/Anak.
- Hamil KEK.

Pelaku Stunting

- Peningkatan Kolaborasi dalam Intervensi.
- Peningkatan kapasitas Pelaku (TPK, KPM).
- Peningkatan sharing informasi stunting antar pelaku.



Faktor Anak

- Kelahiran Prematur
- Bayi BBLR
- Penyakit Infeksi

Masyarakat dan Lingkungan

- Stunting dianggap tabu sehingga enggan diberi intervensi.
- Kelayakan Air Bersih dan Sanitasi Aman
- Perilaku merokok Masyarakat





Terima Kasih